

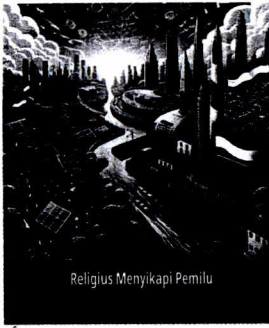
# ROHANI

Menjadi Semakin Insani



## Religius Menyikapi Pemilu

*Appreciative Inquiry* untuk Kampanye | UNPAR bersama OSU Hadir di IKN  
Intrik Politik Raja Salomo | Pemilu 2024: Generasi Muda adalah Penentu



Religius Menyikapi Pemilu

ISSN: 1411 - 8505

**KATA REDAKSI**

**1 | Appreciative Inquiry untuk Kampanye**

Antonius Sumarwan, SJ

**SAJIAN UTAMA**

**5 | Menjadi Garam dan Terang: Gereja Katolik di Ibu Kota Nusantara**

Yanuar Nugroho dan Claudia Rosari Dewi

**14 | UNPAR bersama OSU Hadir di IKN**

Mangadar Situmorang

**SAJIAN UTAMA**

**18 | Keadilan dan Kasih: Pemikiran Niebuhr untuk Politik Indonesia**

Klaus H. Raditio SJ

**OLEH-OLEH REFLEKSI**

**23 | Pemilu 2024: Generasi Muda adalah Penentu Rengga Nata Pratama**

**BAGI RASA**

**26 | Bintang Penuntun Tarsisia, CB**

**SABDA YANG HIDUP**

**28 | Intrik Politik Raja Salomo Nikolas Kristiyanto, SJ**

**KAUL BIARA**

**33 | Religius Menyikapi Pemilu Paul Suparno, SJ**

**ILUSTRASI COVER:**

AI Image by Klaus Heinrich Raditio, SJ

**CARA BERLANGGANAN:**

Hubungi agen setempat atau langsung ke bagian Distribusi Majalah ROHANI. Harga eceran: @ Rp20.000,00 langganan 12 bulan Rp240.000,00 (belum termasuk ongkos kirim), langganan 1 tahun dibayar di muka. Pembayaran Melalui: BCA 1263333300 a.n.Yayasan Basis atau BNI 46 Cab. Yogyakarta a.n. Bpk Sindhunata No. 1952000512.

**RUANG DOA**

**38 | Merasa, Mendengar, Mengambil Peran F. Ray Popo, SJ**

**BELAJAR TEOLOGI**

**43 | Paham Ketuhanan dalam Kebudayaan Ngadha, NTT Leonardo Alessandro Mite, CSsR**

**SENI DAN RELIGIOSITAS**

**47 | Ikhtiar Kembali ke Pengalaman dalam Film Budi Pekerti (2023) Beda Holy Septianno, SJ**

**REMAH-REMAH**

**51 | Berefleksi bersama Tumbuhan Natasia Silaban, KSFL**

**NOSTALGIA**

**53 | Rohani, Partai-partai Politik, dan Pemilu 1955 Redaksi Rohani**

PEMANGGUNG JAWAB  
G.P. Sindhunata, SJ

PEMIMPIN REDAKSI  
Antonius Sumarwan, SJ

KOORDINATOR  
Frederick Ray Popo SJ

REDAKSI  
Tiro Angelo Daenuwy, SJ  
Roberthus Kalis Jati, SJ  
Andreas Agung Nugroho, SJ  
Ishak Jacues Cavin, SJ  
Klaus Heinrich Raditio, SJ

ARTISTIK  
Willy Putranta  
Slamet Riyadi

KEUANGAN  
Ani Ratna Sari

PROMOSI  
Francisca Triharyani

IKLAN  
Slamet Riyadi

ADMINISTRASI, SIRKULASI, dan DISTRIBUSI  
Maria Dwi Jayanti  
Anang Pramuriyanto

**HUBUNGI KAMI!**

Redaksi:  
rohanimajalah@gmail.com  
Administrasi/distribusi:  
rohani.adisi@gmail.com

Jl. Pringgokusuman  
No. 35, Yogyakarta 55272  
0274.546811, 085729548877  
0274.546811

Redaksi menerima naskah yang sesuai dengan rubrik yang tersedia. Panjang karangan maksimal 11.000 karakter (3-4 hlm. A4 spasi 1). Kirim ke rohanimajalah@gmail.com dengan disertai nama lengkap, alamat, dan nomor rekening. Redaksi berhak menyunting semua naskah yang diterima. Tema untuk edisi Februari 2024 adalah "Thomas Aquinas (750 tahun wafatnya)" dan Maret 2024 adalah "Senjakaala Sumbu". Tanggal syukuran pengidaman naskah adalah tanggal 5, satu bulan sebelum edisi tersebut diterbitkan.



# Menjadi Garam dan Terang: Gereja Katolik di Ibu Kota Nusantara

Tahun 2024 ini, masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir. Memerintah selama 10 tahun, pemerintahan Jokowi telah menyelesaikan banyak hal, memenuhi janji “Nawacita”, dan meninggalkan sejumlah *legacy*. Mulai dari pembangunan manusia di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, hingga reformasi agraria dan perhutanan sosial, dan tentu saja pembangunan infrastruktur konektivitas yang begitu masif yang belum pernah terjadi sebelumnya.

**YANUAR NUGROHO DAN CLAUDIA ROSARI DEWI** | NALAR Institute

WARISAN lain Jokowi adalah pemindahan Ibu Kota, dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Ibu Kota yang baru ini dinamai Nusantara; dan proses pembangunannya sudah dimulai di akhir periode Jokowi ini. Bahkan, Jokowi menargetkan untuk sudah mulai bekerja dari Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun 2024 dan merayakan Upacara 17 Agustus 2024 di sana.

## **Pemindahan Ibu Kota dan Perdebatannya**

Tekad membangun—atau memindahkan—IKN ini dikukuhkan

dalam Undang Undang No. 3/2022 tentang Ibu Kota Negara. UU ini dijalankan dengan tiga Peraturan Pemerintah dan enam Peraturan Presiden. Tentu saja pembangunan IKN ini tidak lepas dari perdebatan publik, baik masyarakat biasa/awam, akademisi, maupun birokrat bahkan pejabat negara sendiri. Perdebatan ini mencakup banyak aspek, tetapi secara umum bisa dikelompokkan menjadi dua.

Pertama, tentang prioritas kebijakan dan pembangunan di tengah pandemi (karena tekad membangun ini dicanangkan di tengah pandemi COVID-19).

Dikhawatirkan pembangunan proyek IKN ini akan mengalihkan perhatian dan fokus pemerintah dalam menangani pandemi. Pembangunan IKN ini juga sempat dikhawatirkan menambah risiko defisit APBN Indonesia yang bisa mencapai lebih dari 3% per tahun, berdampak pada penurunan penerimaan negara dan utang publik.

Anggaran pembangunan IKN juga dipandang tidak sepadan: pemerintah mengalokasikan Rp455,62 triliun untuk pemulihan ekonomi pasca-COVID (2022), sedangkan proyek IKN akan menelan biaya total Rp466 triliun dengan Tahap I (2022-2024) sebesar Rp110 triliun.

Perdebatan kedua terkait dampak dan aspek sosio-ekologis. Secara sosiologis, dikhawatirkan terjadi disparitas sosial, ledakan urbanisasi dan konflik sosial jika pembangunan IKN ini tidak terkelola dengan baik.

Direncanakan pada 2027 sekitar 127.000 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipindahkan ke IKN dari Jawa/Jakarta. Mereka ini adalah kelas menengah atas terdidik dan mayoritas muslim yang akan berintegrasi dengan warga lokal yang mayoritas kelas menengah ke bawah dan nonmuslim. Kekhawatiran konflik sosial bukan tanpa alasan—apalagi ketika “kue pembangunan” dinikmati pendatang.

Kekhawatiran lain adalah terpinggirkannya kelompok adat (tercatat ada 21 kelompok dengan jumlah warga 20.000 orang di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara) yang hidupnya terkena dampak langsung. Ini meng-

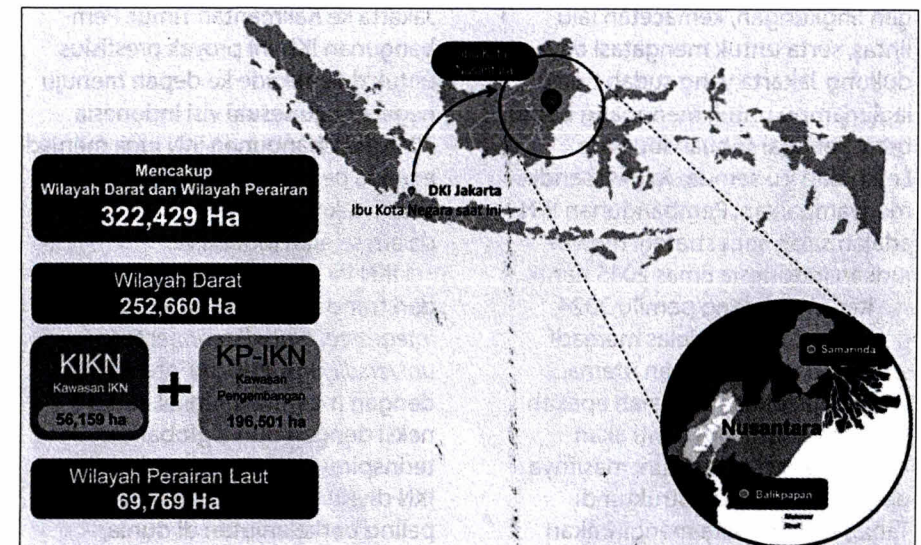
ingatkan cerita buruk terpinggirkannya orang Betawi di Jakarta.

Sedangkan secara lingkungan, dikhawatirkan pembangunan IKN akan mendegradasi hutan hujan tropis Kalimantan yang saat ini saja sudah rusak karena ekspansi perusahaan pertambangan dan agro-kompleks. Megaprojek IKN juga dipandang menjadi ancaman terhadap ekosistem biologis yang rapuh dan kelestarian lingkungan.

Seluruh perdebatan di atas—dalam kerangka persiapan, penyelesaian pembangunan, dan pemindahan IKN—telah menjadi pembahasan hangat sejak gagasan ini dicetuskan Presiden pada pidato kenegaraan 16 Agustus 2019. Meski Jokowi bukanlah Presiden Indonesia pertama yang mengajukan gagasan memindah ibu kota, tetapi Jokowi-lah yang menunjukkan komitmen melaksanakannya.

Tahun 1957, Presiden Soekarno mewacanakan pemindahan ibu kota negara ke Palangkaraya Kalimantan; lalu pada 1980 Presiden Soeharto menggagas pemindahan ibu kota ke Jonggol lewat Keputusan Presiden No 1/1997; dan pada 2010 Presiden SBY mewacanakan opsi mempertahankan ibu kota negara di Jakarta dengan pembangunan terencana dan tepat atau memindahkan pusat pemerintahan keluar dari Jakarta.

Melihat catatan setahun yang lalu, debat pemindahan ibu kota ini makin memanas saat COVID-19 menghantam kita: Apakah bijak



Gambar 1. Pemindahan Ibu Kota Negara. Sumber: Otorita IKN (2023)

memindah ibu kota saat warga menderita? Namun, pemerintah Jokowi tetap tancap gas membangun IKN. IKN direncanakan mencakup wilayah darat dan perairan dengan total seluas 322.429 hektare. Wilayah laut mencakup 69.769 hektare sedangkan wilayah darat mencakup luasan 252.660 hektare. Wilayah darat ini terbagi atas Kawasan IKN (KIKN) 56.159 hektare dan Kawasan Pengembangan IKN (KPIKN) seluas 196.501 hektare. Lihat Gambar 1.

Pembangunan IKN sendiri terdiri dari lima tahap. Tahap I (2022-2024) adalah memulai perpindahan sebagian kantor pemerintahan; Tahap II (2025-2029) memperkuat kawasan inti Nusantara, memperluas area perumahan, kantor dan zona komersial; Tahap III (2030-2034) mengembangkan sektor

pendidikan dan kesehatan serta industri teknologi tinggi; Tahap IV (2035-2039) menyelesaikan seluruh infrastruktur dan ekosistem “tiga kota” untuk percepatan pembangunan Kalimantan; dan Tahap V (2040-2045) membangun reputasi sebagai “Kota Dunia untuk Semua”.

Hingga saat tulisan ini disiapkan (medio November 2023), Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN mengatakan bahwa proses konstruksi infrastruktur dasar IKN Tahap I kini sudah mencapai 38,1 persen (tempo.co, 2023). Artinya, pembangunan IKN tetap berlanjut dan Tahap I ini diperkirakan akan sepenuhnya tercapai pada 2024.

Ini merupakan penegasan tekad Jokowi memindahkan ibu kota untuk membangun ekonomi yang merata, mengatasi polusi udara



dan lingkungan, kemacetan lalu lintas, serta untuk mengatasi daya dukung Jakarta yang sudah tidak lagi mampu untuk menopang beban berat sebagai sebuah ibu kota. Lebih dari itu semua, Jokowi sendiri menyampaikan: Pembangunan IKN adalah salah satu strategi mewujudkan Indonesia Emas 2045 nanti.

Kini, menjelang pemilu 2024, pembangunan IKN jelas menjadi satu isu dan perdebatan utama. Tentu saja fokusnya adalah apakah pemerintahan baru nanti akan meneruskannya. Namun, masifnya pembangunan infrastruktur di Tahap I ini ternyata mengirimkan pesan kuat: Jokowi mengawali pembangunan IKN ini sedemikian rupa sehingga tidak akan bisa dihentikan atau dibatalkan oleh siapa pun pemimpin negeri di masa depan—atau “reaching the point of no return”.

Ini terbukti dari Visi-Misi ketiga pasangan calon presiden-wakil presiden. Tentu saja juga ada pengaruh UU IKN yang mewajibkan pemerintah meneruskannya. Namun, baik pasangan Anies-Muhaimin, Ganjar-Mahfud, dan Prabowo-Gibran semuanya menyatakan komitmennya untuk meneruskan pembangunan IKN. Barangkali akan ada perbedaan skala dan kecepatan membangunnya—tergantung karakteristik paslon—tetapi jelas tidak akan dihentikan.

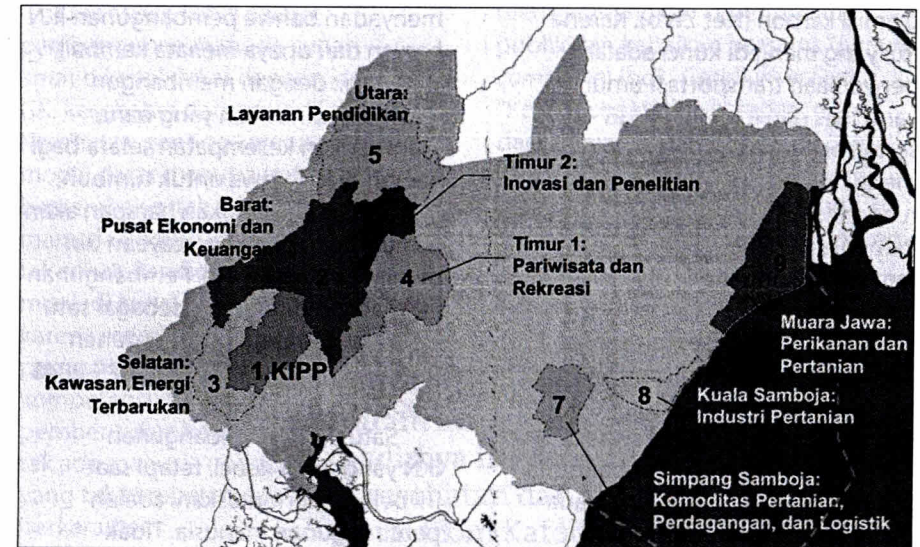
**Pembangunan IKN**

Penyelesaian Tahap I Pembangunan IKN akan secara resmi menandai pemindahan Ibu Kota dari

Jakarta ke Kalimantan Timur. Pembangunan IKN ini proyek prestisius untuk dua dekade ke depan menuju negara maju sesuai visi Indonesia 2045. Pembangunan IKN juga menjadi agenda pemerintah terbesar—baik secara teknokratis maupun politis—dalam sejarah Indonesia.

IKN ini menjadi bagian penting dari transformasi struktural: *locally integrated, globally connected, universally inspired* (terintegrasi dengan masyarakat lokal, terkoneksi dengan dunia global dan terinspirasi oleh semesta) karena IKN divisikan untuk menjadi kota paling berkelanjutan di dunia, simbol identitas bangsa Indonesia, pendorong ekonomi utama negeri di masa depan. Selain itu, diharapkan agar IKN mampu merepresentasikan dan mencerminkan semangat persatuan yang kuat dari keragaman budaya, suku, bahasa, dan agama.

Perencanaan wilayah di IKN disusun dengan saksama dan memperhatikan serta memperhitungkan pengembangan wilayah strategis. Akan ada sembilan bagian/regio dalam pengembangan dan perencanaan wilayah IKN. Satu, KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan); dua, Barat: Pusat ekonomi dan keuangan; tiga, Selatan: Kawasan energi terbarukan; empat, Timur 1: Pariwisata dan rekreasi; lima, Utara: Layanan pendidikan; enam, Timur 2: Inovasi dan penelitian; tujuh, Simpang Samboja: Komoditas pertanian, perdagangan, dan logistik; delapan, Kuala Samboja: Industri pertanian;



Gambar 2. Perencanaan Wilayah IKN. Sumber: Deputi Pengendalian Pembangunan IKN (2023)

dan sembilan, Muara Jawa: Perikanan dan pertanian. Lihat gambar 2.

Pembangunan IKN menjadi sebuah harapan dan memunculkan peluang, tetapi juga sekaligus tantangan. Pertama, di bidang ekonomi. Pembangunan IKN akan menjadi stimulasi pertumbuhan ekonomi pascapandemi. Saat ini, Pulau Jawa menyumbang 58,49% terhadap PDB dengan 20,85% berasal dari Jakarta (BPS, 2018).

Pembangunan IKN ini menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi nasional pascapandemi dan juga diharapkan untuk mendorong industrialisasi baru di daerah sekitar dan menciptakan lapangan kerja. IKN divisikan menjadi *economic super-hub* yang menggerakkan perekonomian bangsa dan membantu Indonesia mencapai target PDB USD180

miliar dan menciptakan 4.811.000 lapangan kerja tahun 2045 nanti. Secara khusus, IKN diproyeksikan mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim menjadi 6,3%, menurunkan angka kemiskinan menjadi 5,92, dan menekan angka pengangguran menjadi 6-6,5%.

Kedua, di bidang pembangunan perkotaan. Nusantara akan dibangun menjadi sebuah Ibu Kota Negara yang pintar, hijau, dan berkelanjutan. Dengan demikian, IKN akan berkontribusi langsung untuk meningkatkan daya saing global. IKN juga akan mewujudkan konsep *smart city* dan *forest city*. Visi ini kontekstual dan relevan dengan pulau Kalimantan sebagai hujan tropis dan paru-paru dunia.

Konsekuensi dari kota hijau adalah IKN akan didesain menuju



0 emisi karbon (Net Zero). Karena itu, yang menjadi kunci adalah penyediaan transportasi umum yang luas dan mobilitas aktif serta komitmen otorita IKN untuk mengalokasikan setidaknya 75% ruang terbuka hijau di Kawasan Pemerintah dengan teknologi ramah lingkungan untuk semua bangunan.

Dalam menyukseskan proses pembangunan IKN ini, perlu keterlibatan semua sektor, tidak hanya publik tetapi juga swasta. Artinya, keberhasilan pembangunan IKN tidak dapat bergantung pada pemerintah saja, tetapi juga peran swasta dan masyarakat sipil sangat dibutuhkan. Terlebih dalam menghadapi masalah dalam tata kelola pemerintah. Oleh karena itu, kapasitas kolaborasi lintas sektor menjadi penting.

#### Keterlibatan Gereja Katolik

Menilik inisiatif dan dinamika pembangunan IKN ini, hemat kami Gereja Katolik (GK) di Indonesia perlu dan harus terlibat secara *aktif*. Keterlibatan ini sejalan dengan misi dan perutusan sebagai persekutuan umat Allah yang diutus untuk melibati dan menghidupi dunia (bdk. Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis*).

GK mesti melihat pembangunan IKN lebih dari sekadar membangun kota atau berbagai infrastruktur fisik. GK juga mesti mencatat cermat bahwa pemindahan IKN ini bukan hanya pemindahan pusat pemerintahan. GK seharusnya

menyadari bahwa pembangunan IKN bagian dari upaya menata kembali negeri ini: dengan membangun pusat pertumbuhan yang baru, memberikan kesempatan setara bagi daerah di luar Jawa untuk tumbuh, sekaligus menanamkan harapan akan kemampuan dan kepercayaan diri menjadi bangsa maju. Pembangunan IKN bahkan ditetapkan sebagai satu dari enam strategi pembangunan Indonesia jangka panjang 2025-2045 (Bappenas, 2023).

Satu aspek pembangunan IKN yang amat kunci, tetapi saat ini belum diprioritaskan, adalah pembangunan manusia. Tidak ada kota—apalagi ibu kota—yang maju tanpa manusia berkualitas. Pemerintah saat ini tidak, atau belum, memprioritaskan pembangunan manusia di IKN karena masih terfokus pada upaya mengejar penyelesaian pembangunan fisik.

Sebagian dari upaya pembangunan manusia saat ini dalam jangka pendek adalah *memindahkan* sumber daya manusia—khususnya birokrasi dan perangkat pendukungnya—dari Jawa dan Jakarta ke Nusantara. Pendekatan ini dalam jangka panjang akan bermasalah karena tidak menangani akar masalahnya: melahirkan sumber daya manusia unggul dari dalam wilayah IKN sendiri. Inilah sektor strategis yang belum digarap pemerintah dan GK bisa—dan harus—terlibat dan berkontribusi: membangun manusia IKN—di IKN, dan untuk IKN.

Dua aspek kunci dalam pembangunan manusia sudah amat dikenal dekat dengan karya GK: kesehatan dan pendidikan. Kesehatan penting karena menjadi modal dasar manusia untuk berkembang: tak ada manusia unggul yang tak sehat. Pendidikan menjadi kunci karena memberikan pengembangan kompetensi dan pembentukan karakter: tak ada manusia unggul yang tak kompeten dan berkarakter.

Bagaimana keterlibatan GK dalam pembangunan manusia ini? Jawabnya singkat: kolaborasi.

Kolaborasi menjadi langkah penting bagi semua pihak termasuk GK lewat berbagai tarekat karya untuk terlibat dalam pembangunan IKN. Institusi pendidikan dan kesehatan Katolik yang dimiliki dan dikelola berbagai tarekat perlu memiliki visi dan misi dalam mengembangkan pelayanan dan perutusan di IKN. Sebagai bagian dari peziarahannya di dunia untuk ikut menyucikan dan menyempurnakannya, GK didorong untuk terlibat dalam

memperjuangkan kepentingan publik dan kebaikan bersama (*bonum commune*) (bdk. *Gaudium et Spes* “Kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin

dan siapa saja yang menderita, merupakan kegembiraan dan harapan, duka dan kecemasan para murid Kristus juga.”).

Ini merupakan suatu komitmen yang mengakar pada makin kuatnya tindakan untuk kebaikan bersama. Karena itu, ketika tarekat dan karya mereka membangun instansi pendidikan dan kesehatan Katolik hadir di IKN, maka secara langsung ia akan turut serta melibatkan diri pada kepentingan publik. Lebih-lebih, berperan aktif dalam membangun manusia melalui layanan kesehatan dan pendidikan kompetensi dan karakter bagi masyarakat Indonesia di IKN.

Keterlibatan GK dalam pembangunan IKN ini adalah pilihan politik untuk secara aktif mewujudkan *bonum commune* sebagai pembedaan cita-cita dan harapan warga (tidak hanya umat). Perlu

“  
Dengan iman yang teguh akan prinsip menjadi garam dan terang, hadirnya institusi kesehatan dan pendidikan Katolik di IKN menunjukkan diri sebagai garam—yang larut dengan baik dan berpengaruh secara nyata serta dapat dirasakan meski tidak kelihatan—dan sebagai terang—yang dengan gamblang menjadi inspirasi dan menunjukkan arah.”



dipahami bahwa politik yang dimaksudkan di sini bukanlah politik dalam arti “upaya merebut dan mempertahankan kekuasaan”, melainkan politik sebagai sarana—siasat dan strategi—untuk melibatkan diri dalam pergumulan duniawi secara lebih menyeluruh dan terus-menerus.

Tentu ada yang melihat dari kacamata lain: bahwa kepentingan GK terlibat dalam pembangunan IKN adalah soal eksistensi—khususnya eksistensi umat Katolik. Pendapat ini tidak salah, tetapi bukan itu fokusnya.

Tentu saja kehadiran GK di IKN menguatkan pesan akan keragaman relasi antaragama dan antarkepercayaan di ibu kota baru. Namun, lebih penting dan lebih mendasar dari itu, kehadiran GK dalam karya-karyanya—khususnya kesehatan dan pendidikan—harus bisa memberi warna yang khas mencerminkan spiritualitas Kristiani.

Layanan kesehatan di IKN yang diberikan oleh institusi kesehatan Katolik tanpa diskriminasi latar belakang sosial-ekonomi-politik-agama harus menjadi ciri dan menginspirasi. Demikian pula dengan kualitas kompetensi dan karakter anak didik lulusan institusi pendidikan Katolik di IKN: mereka harus bisa menjadi generasi baru yang berdaya, berkompeten, berkarakter, dan berintegritas. Inilah kontribusi terpenting GK dalam membangun manusia untuk dan di IKN: membangun generasi muda yang akan meneruskan membangun Indonesia.

Fokus pada pembangunan manusia khususnya generasi muda ini penting karena di pundak merekalah masa depan negeri ini terletak. Membangun manusia mesti menjadi fokus utama keterlibatan GK di IKN—yang jauh lebih penting dari sekadar urusan eksistensi umat beragama. Dalam membangun manusia, diperlukan pendekatan yang lebih utuh dan adaptif untuk memahami perilaku masyarakat secara keseluruhan.

Di sinilah peran GK: lewat karya kesehatan dan pendidikan, turut membangun masa depan Indonesia melalui keterlibatan langsung dan tata kelola layanan yang lebih baik (*good governance*). Artinya, GK mau terlibat dalam pergumulan perdebatan konkret duniawi seputar pembangunan IKN: mulai dari soal etika (kepantasan), hingga politik (kekuasaan)—mulai dari upaya mengejar kemajuan dan pertumbuhan, hingga upaya menata sumber daya negara dan pemerintahan. Inilah partisipasi konkret GK dalam pembangunan IKN. Ini semua membangun satu kesadaran bahwa kita sebagai umat Katolik juga bisa dan harus berpartisipasi dalam membangun tata kelola negeri ini agar menjadi lebih baik.

### **Bergandengan Tangan dalam Karya**

Komitmen pemerintah dalam membangun berbagai fasilitas publik di IKN mesti didukung. Perlu disadari bahwa tidak semua hal bisa serta-merta dibangun oleh pemerintah—

perlu ada prioritas. Saat ini, ketika pemerintah memprioritaskan penyelesaian infrastruktur fisik pemerintahan (istana, gedung, kompleks pemerintah, dan lain-lain), maka GK bisa mengambil peran untuk menyiapkan hal-hal penting tetapi belum bisa diprioritaskan pemerintah—utamanya pendidikan dan kesehatan.

Peran serta tarekat dan institusi pendidikan Katolik di tanah IKN merefleksikan peran serta Gereja yang juga selalu ingin terintegrasi dalam masyarakat. Hemat kami, inilah yang disebut bahwa Gereja menjadi garam dan terang dunia: yakni peran instansi pendidikan dan kesehatan Katolik di IKN yang turut mempersiapkan generasi muda Indonesia yang mampu meraup bonus demografi untuk menyejahterakan negeri.

Dengan iman yang teguh akan prinsip menjadi garam dan terang, hadirnya institusi kesehatan dan pendidikan Katolik di IKN menunjukkan diri sebagai garam—yang larut dengan baik dan berpengaruh secara nyata serta dapat dirasakan meski tidak kelihatan—dan sebagai terang—yang dengan gamblang menjadi inspirasi dan menunjukkan arah.

Lebih jauh lagi, agar melalui karya-karya tersebut nilai integritas, setia kawan, pengorbanan, dan berbagai keutamaan khususnya kasih, makin tertanam dalam dinamika kehidupan publik di IKN. Itulah cara kita sebagai umat Katolik

bergandengan tangan tidak saja antarkita, tetapi dengan seluruh anak bangsa. Itulah cara kita merasul dan mewartakan kabar gembira melalui perutusan dan karya nyata di dunia. Akhirnya: itulah cara kita menghadirkan Kerajaan Allah di dunia—di IKN.

Semoga kini kita menyadari dua pokok kunci keterlibatan GK di IKN. Pertama, bahwa keterlibatan GK dalam pembangunan di dan untuk IKN adalah imperatif (konsekuensi) dari panggilan untuk terlibat dalam suka duka dunia. Kedua, bahwa ini semua juga hanyalah sarana, bukan tujuan—agar makin banyak orang yang memuji dan memuliakan Allah dalam karya-karya mereka, khususnya menjalankan roda kehidupan di Ibu Kota Nusantara. ◆

*Yanuar Nugroho* adalah pendiri dan penasihat di NALAR Institute dan staf pengajar di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta.  
E-mail: yanuar.nugroho@gmail.com;  
@yanuarnugroho

*Claudia Rosari Dewi* adalah Direktur Eksekutif NALAR Institute, Alumnus Magis Indonesia 2013.  
E-mail: claudia.rosaridewi@gmail.com;  
@claudiarosaridewi